

CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia.

CSIS Commentaries ECON-002-ID

15 April 2020

Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?

Lestary J. Barany

Asisten Peneliti, Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia

Indira Simanjuntak

Asisten Peneliti, Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia

Dewa Ayu Widia

Asisten Peneliti, Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia

Yose Rizal Damuri

Kepala Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia

yose.rizal@csis.or.id

Pesan Utama

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme *self-reporting* bagi yang terdampak dan membutuhkan bantuan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain atau pihak swasta, terutama *start-up* yang memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan.
2. Sisi suplai seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Persyaratan untuk memperoleh bansos perlu dilonggarkan sesuai dengan kondisi terkini. Bahkan bila perlu, bantuan sosial diubah menjadi tanpa persyaratan.
4. Diperlukan komunikasi publik yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya.
5. Sebagaimana pelaksanaan program bantuan sosial berada di bawah Kemensos, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian PUPR, hingga Pemerintah Daerah, sinergi antar K/L diperlukan. Meskipun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan, kunci kesuksesan program ini berada pada komunikasi, kerja sama dan koordinasi *multi-stakeholder*.

Selama masa pandemi COVID-19, tujuan utama setiap kebijakan semestinya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Untuk itu, kebijakan pembatasan jarak sosial diterapkan dengan harapan bahwa penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas dengan semakin banyak orang yang tinggal di rumah saja. Sayangnya, tidak semua orang bisa bekerja dari rumah. Salah satu penyebabnya lantaran biaya untuk di rumah saja terlalu besar dan mereka tidak mampu memenuhinya. Di sinilah pemerintah berperan melalui ragam program Jaring Pengaman Sosial. Lalu, apakah program tersebut dapat merangkul kelompok dengan ekonomi rentan?

Kementerian Keuangan mengumumkan stimulus ekonomi untuk menangani dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia melalui alokasi APBN sebesar Rp 405,1 triliun. Dalam anggaran tersebut, terdapat alokasi untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp110 triliun. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing program bantuan sosial, seiring dengan meningkatnya rumah tangga golongan miskin. Maka, apakah peningkatan tersebut sudah tepat menasaskan seluruh kelompok masyarakat yang rentan? Seberapa efektif program JPS dalam membantu mereka?

Mengapa JPS Diperlukan Selama Pandemi COVID-19?

Menteri Keuangan menekankan bahwa terdapat empat sektor yang paling terpukul akibat pandemi, yakni sektor rumah tangga, pekerja informal, UMKM dan korporasi.¹ Dari keempat sektor tersebut, pekerja adalah yang paling rentan kehilangan pendapatan dalam jumlah yang besar. Lebih jauh, kelompok masyarakat yang paling rentan bisa diidentifikasi berdasarkan pekerjaan yang paling terpukul akibat COVID-19.

Pertama, pekerja informal yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan *containment*. Kerja dari rumah (KDR) dan *physical distancing* menyebabkan penurunan permintaan terhadap jasa pekerja informal. Sederhananya, pekerja informal mencakup pekerja dan pengusaha yang tidak terikat kontrak, seperti sopir transportasi daring, sopir taksi, buruh harian, atau pedagang kaki lima. Per Agustus 2019, pekerja informal di Indonesia meliputi 55,72 persen dari total tenaga kerja.² Sebagian besar pekerja informal mengandalkan upah harian untuk memenuhi kebutuhannya. Ini dapat mengindikasikan bahwa pekerja informal tidak memiliki tabungan sebagai jaring pengaman di tengah situasi saat ini.

Contoh konkret dampak kebijakan *containment* yang terjadi di lapangan adalah menurunnya pendapatan ojek daring di perkotaan akibat menurunnya mobilitas pekerja. Menurut data Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA)³, penurunan pesanan *trip* ojek daring mencapai 50-80 persen. Untungnya, masih ada permintaan untuk pesan-antar makanan yang meningkat sebesar 10-20 persen. Namun, kenaikan itu terbatasi oleh tutupnya restoran di pusat perbelanjaan dan mitra penjual lainnya. Sementara, para pengemudi taksi baik konvensional maupun *online* tidak memiliki fitur pesan antar makanan.

Dilansir dari pernyataan Dewan Asosiasi Driver Online, para pengemudi taksi daring mengalami penurunan pendapatan hingga 80 persen. Dengan menggunakan informasi dari laporan *Riset Ekonomi Peran Grab terhadap Perekonomian Sektor Informal Indonesia* (Tenggara Strategic dan CSIS, 2018) kami mengestimasi pendapatan driver Grab Car setelah ada pembatasan kegiatan berkisar antara Rp 420.000,- sampai Rp 1.540.000,-.

Angka ini jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP)⁴ di DKI Jakarta. Penurunan pendapatan ini tentu mempengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, selain mengurangi daya beli. sehingga peran pemerintah dibutuhkan dalam mengisi celah tersebut melalui bantuan sosial.

Kedua, kelompok masyarakat rentan selanjutnya adalah para pekerja yang di PHK di masa pandemi. Jumlah pekerja yang di PHK atau dirumahkan terus melonjak tajam setelah himbauan pertama KDR yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2020. Adapun sektor yang paling rentan terdampak COVID-19 di Indonesia adalah sektor-sektor yang terlibat pada rantai pasokan global atau aktivitasnya memerlukan kehadiran atau interaksi fisik, meliputi sektor pariwisata, transportasi, restoran, retail, dan manufaktur.

1 Sumber: Press Conference bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Dewan Komisioner LPS terkait Stimulus Ekonomi pada Rabu (01/04)

2 SAKERNAS, Badan Pusat Statistik, 2019

3 <https://katadata.co.id/berita/2020/03/30/pendapatan-pengemudi-taksi-dan-ojek-online-anjlok-80-akibat-corona> diakses 5 April 2020

4 UMP DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar Rp 4.276.349,-

Tabel 1. Data PHK di Seluruh Indonesia per 7 April 2020

Sektor	Jumlah Perusahaan yang Merumahkan Pekerja/PHK	Jumlah Pekerja dirumahkan/PHK
Formal	39.997	1.010.579
Informal	34.453	189.452
Total	74.430	1.200.031

*Dirumahkan: meliburkan atau membebaskan pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sementara waktu. Perusahaan membayar gaji tidak penuh atau tidak membayar gaji sama sekali.

Sumber: Pernyataan Pers Kementerian Ketenagakerjaan, 7 April 2020

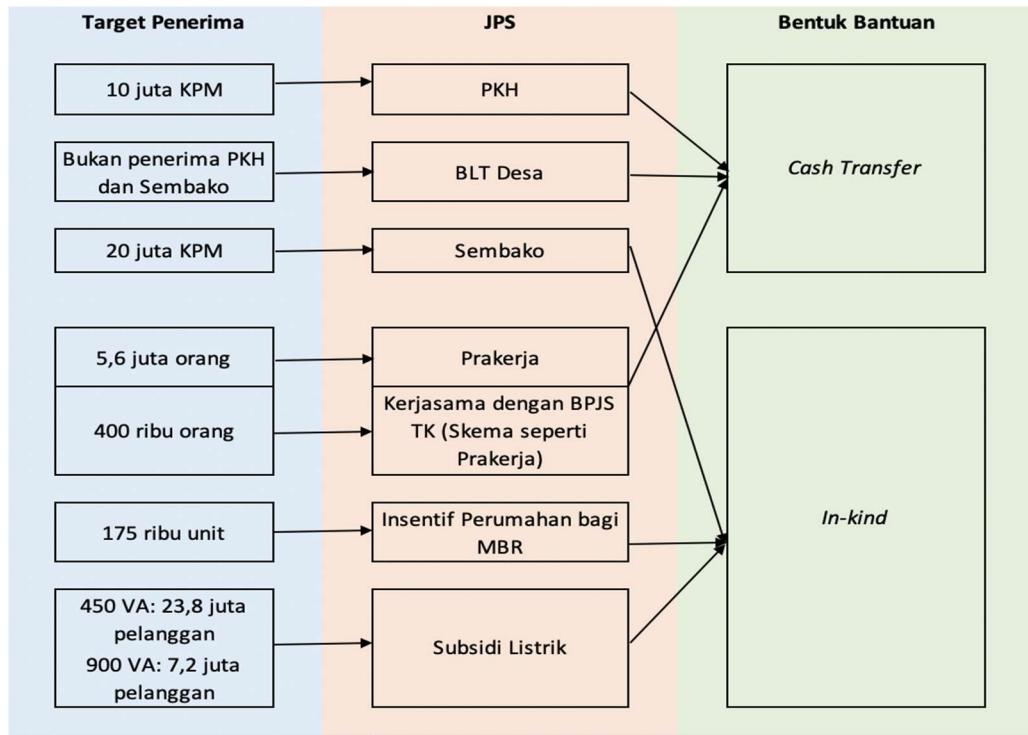
Berdasarkan data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan pada 7 April 2020, pekerja yang paling banyak di PHK dan dirumahkan datang dari sektor formal, di mana sebanyak 1.010.579 pekerja dirumahkan dan PHK oleh total 39.977 perusahaan. Sementara, 189.452 pekerja sektor informal di PHK dan dirumahkan oleh 34.453 perusahaan. Pemerintah perlu mencatat bahwa korban PHK dan dirumahkan tidak memiliki sumber pendapatan untuk waktu yang belum bisa ditentukan, setidaknya hingga perekonomian mulai bangkit. Dengan tidak adanya pendapatan, kelompok ini rentan masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Dengan demikian, baik pekerja informal maupun pekerja yang di PHK dan dirumahkan, berpotensi sangat besar masuk ke dalam garis kemiskinan. Tidak adanya lapangan pekerjaan baru di tengah pandemi membuat dependensi tinggi terhadap bantuan sosial dari pemerintah dan donasi. Kebutuhan ini berskala besar, menimbulkan banyaknya jumlah pekerja informal dan korban PHK di Indonesia, ditambah rumah tangga yang sudah tergolong miskin dari sebelum pandemi. Otomatis, besaran nominal dan jumlah bantuan sosial yang dibutuhkan pun semakin tinggi, karena menurunnya pendapatan mereka secara drastis.

Sekilas tentang Program JPS

Bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 tidak berfokus pada satu program. Bagan 1 mengilustrasikan garis besar pemetaan tambahan Jaring Pengaman Sosial⁵ yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Subsidi Listrik, dan Subsidi Insentif Perumahan Murah. Pemetaan ini diperlukan untuk mengidentifikasi alokasi anggaran untuk program JPS sudah menjangkau sesuai sasaran.

Bagan 1. Pemetaan Tambahan Jaring Pengaman Sosial



Sumber: dirangkum oleh penulis dari berbagai sumber

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai antisipasi melemahnya daya beli masyarakat akibat wabah COVID-19, pemerintah berencana untuk menambah penyaluran PKH dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Sasaran utama program ini adalah individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial; dengan kriteria tambahan seperti terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.

Terkait dengan situasi pandemi, pemerintah akan melakukan beberapa perubahan pada program ini dengan tujuan sebagai jaringan pengamanan nasional. Adapun beberapa perubahan tersebut beberapa di antaranya adalah penyaluran dana setiap bulan dan peningkatan besaran manfaat. Sejatinya, pencairan dana PKH adalah sebanyak empat tahap dalam setahun yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober setiap tahunnya. Untuk pencairan dana April dipercepat menjadi bulan Maret. Percepatan pencairan dana PKH diharapkan dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi keluarga sehingga dapat terhindar dari penyebaran

⁵ Skema dan mekanisme yang didiskusikan dalam artikel ini merupakan perkembangan terakhir saat proses penulisan (7 April 2020).

virus korona. Untuk besaran dana PKH sendiri mengalami peningkatan sebesar 25% dengan rincian seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Besaran Dana Program Keluarga Harapan

Kategori	Pra-COVID19 (dalam rupiah)	Pasca-COVID19 (dalam rupiah)
Ibu Hamil	2,400,000	3,000,000
Anak Usia Dini	2,400,000	3,000,000
SD	900,000	1,125,000
SMP	1,500,000	1,875,000
SMA	2,000,000	2,500,000
Disabilitas Berat	2,400,000	3,000,000
Lanjut Usia	2,400,000	3,000,000

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia

2. Sembako

Pada anggaran JPS, indeks bantuan program Sembako naik dari Rp 150.000,-/KPM menjadi Rp 200.000,-/KPM. Pemerintah juga menambahkan target penerima KPM dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Penambahan KPM ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disasarkan kepada 30 persen rumah tangga dengan kesejahteraan terendah di Indonesia.

Untuk menampung pertambahan tersebut, pemerintah menambah anggaran program Sembako yang awalnya sebesar Rp 28,02 triliun menjadi Rp 43,73 triliun. Dalam mekanisme distribusinya, KPM akan menerima bantuan dalam bentuk saldo non tunai di Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Program Sembako bertujuan untuk mengurangi beban keluarga rentan dan miskin melalui bantuan bahan pangan. KPM dapat membeli bahan pangan di e-Warong menggunakan bantuan non-tunai yang diberikan dalam bentuk saldo *online* dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KPM dapat menentukan sendiri jumlah, varian, kualitas pangan serta waktu untuk belanja di e-Warong.

3. Kartu Prakerja

Setelah diperluas fungsinya, melalui Prakerja, pemerintah menyasar pekerja yang di-PHK dan bisnis mikro yang kesulitan usaha. Untuk menjadi pemegang Kartu Prakerja yang sah, seseorang harus lulus melalui proses pendaftaran *online*, tes minat bakat, dan seleksi *batch* berdasarkan domisili. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta memperoleh insentif yang disalurkan melalui *e-wallet* atau rekening bank yang telah didaftarkan. Setiap peserta mendapatkan total bantuan sebesar Rp3.550.000.

Dana ini terdiri dari *voucher* pelatihan senilai Rp1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan yang secara total berjumlah Rp150.000. Selama masa wabah COVID-19, peserta hanya diperbolehkan mengambil pelatihan online di platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.

4. Subsidi Listrik

Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembagian token listrik gratis bagi pelanggan prabayar golongan listrik 450 VA dan golongan subsidi 900 VA. Untuk golongan listrik 450 VA, pelanggan akan mendapatkan fasilitas gratis biaya listrik selama tiga bulan; sedangkan untuk golongan listrik 900

VA akan mendapat diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari biaya penggunaan listrik selama 3 bulan terakhir.

Untuk pelanggan pascabayar di golongan 450 VA, biaya listrik akan langsung digratiskan selama bulan April, Mei, dan Juni; sedangkan untuk pelanggan golongan 900 VA pascabayar, tagihan mereka akan dikurangi 50 persen selama tiga bulan tersebut. Untuk pelanggan listrik prabayar golongan 450 dan 900 VA, pelanggan dapat mengklaim token gratis dengan menginformasikan ID Pelanggan mereka melalui situs resmi PLN maupun melalui *whatsapp* resmi PLN. Nantinya pelanggan akan menerima token gratis untuk golongan 450 VA dan subsidi token listrik untuk golongan 900VA yang dapat diinput pada meteran masing-masing pelanggan. Kebijakan listrik gratis ini akan diberlakukan selama tiga bulan dengan pemberian token secara bertahap setiap bulannya.

5. Insentif perumahan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR)

Tujuan bantuan ini agar masyarakat mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau. Ada beberapa syarat agar seseorang bisa menerima manfaat ini, antara lain 1) WNI masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tidak memiliki rumah; 2) penghasilan maksimal Rp8.000.000 per bulan atau Rp.8.500.000 untuk wilayah Papua dan Papua Barat; dan 3) belum pernah menerima bantuan pembiayaan perumahan (pembiayaan pemilikan dan pembangunan rumah) dari Pemerintah.

Adapun total anggaran untuk program ini merupakan yang terkecil di banding program *social safety net* lainnya, yakni sebesar 1,5 Triliun. Insentif diberikan untuk 175.000 unit dalam bentuk penambahan subsidi bunga sebesar 0,8 Triliun dan subsidi uang muka sebesar 0,7 Triliun. Untuk subsidi selisih bunga, besaran bantuanya adalah lima persen untuk bunga konsumen dan 6-7 persen untuk bank pelaksana. Sementara itu, untuk bantuan uang muka, bantuan diberikan sebesar Rp 4.000.000 per unit.

Selain kelima program Jaringan Pengaman Sosial di atas, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 30,8 Triliun sebagai cadangan. Rincian program ini masih dalam pembahasan. Namun, cadangan anggaran ini sangat berpotensi diperuntukkan bagi perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penambahan bantuan sosial di DKI sebagai episentrum COVID-19 di Indonesia. PBI sendiri merupakan fakir miskin yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Akankah Program JPS Berjalan Efektif dan Efisien?

Untuk menakar efektivitas dan efisiensi program bantuan sosial saat diimplementasikan nanti, beberapa aspek yang perlu dilihat meliputi: cakupan, jangka waktu, skema dan mekanisme distribusi bantuan.

Cakupan Bantuan Belum Menjangkau Semua yang Rentan

- **BDT yang digunakan sebagai basis data bansos pada umumnya hanya mencakup 40% kelompok masyarakat miskin.**⁶ Seperti penjelasan di awal tulisan ini, bila ditinjau lebih jauh, pekerja informal, pekerja yang di-PHK, dan bisnis mikro yang memerlukan bantuan mungkin saja belum terekam datanya dalam BDT lantaran tidak tergolong di 40% terendah secara pendapatan. Padahal, pemerintah tentunya membutuhkan data mereka *by name, by address* untuk distribusi bantuan.

Oleh karena itu, kolaborasi dengan lembaga atau pihak swasta sangat patut dipertimbangkan. Misalnya, Gojek dan Grab untuk pekerjaan seperti sopir transportasi *online*, tukang pijat, dan penyedia jasa pembersihan rumah; WarungPintar untuk bisnis mikro; HARA untuk pekerja di sektor agrikultur; dan lain-lain. Ketersediaan data NIK pekerja dari perusahaan yang kemudian dikombinasikan dengan BDT diharapkan dapat menambah cakupan penerima yang memang membutuhkan.

Selain itu pendataan secara mandiri perlu untuk diperluas, paling tidak untuk sebulan pertama sebelum data yang lebih valid dapat tersedia. Selama proses pemetaan ini prinsipnya adalah: lebih baik menolong orang yang mampu, daripada mengabaikan mereka yang butuh pertolongan. Penggunaan nomor HP untuk menyederhanakan proses juga bisa dilaksanakan.

- **Kebijakan bekerja dan belajar dari rumah yang telah berjalan sejak pertengahan Maret 2020 tentunya menggeser beban biaya operasional menjadi tanggungan masing-masing pekerja.** Terkait dengan ini, PLN mencatat bahwa konsumsi listrik rumah tangga di DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen⁷ sejak diberlakukan kebijakan WFH sepanjang bulan Maret 2020. Sementara, kebijakan diskon tarif listrik, hal penggratisan hanya berlaku untuk pelanggan dengan tarif listrik 450 VA yang notabene terbatas hanya pada penggunaan listrik seadanya. Dari data statistik PLN 2018, hanya sekitar tujuh juta pelanggan (dari total 25 juta pelanggan kelompok menengah-bawah) yang merasakan bantuan tersebut. Artinya, masih banyak pelanggan di kelas menengah-bawah yang belum menerima manfaat kebijakan tersebut meskipun mereka turut terkena imbas dari pandemi. Dalam hal ini, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan perluasan cakupan target penerima manfaat.

Skema Bantuan Masih Dapat Dirancang Lebih Optimal

- **Selama masa *physical distancing*, bantuan yang kondisional semakin sulit dipenuhi persyaratannya.** Kebijakan yang mendorong orang untuk tinggal di rumah saja agaknya masih menjadi momok dalam pelaksanaan kebijakan JPS yang berupa bantuan kondisional, seperti PKH dan Prakerja. Bantuan sosial PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh dana bantuan di setiap periode. Beberapa di antaranya adalah kehadiran di sekolah minimal 85 persen untuk anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan

6 <http://bdt.tnp2k.go.id/tanyajawab/> diakses 5 April 2020

7 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200406200325-4-150153/work-from-home-sebulan-konsumsi-listrik-industri-turun-5>

wajib serta pemeriksaan ke fasilitas kesehatan bagi ibu hamil, bayi baru lahir, dan anak usia dini.

Kewajiban tersebut menjadi sulit dipenuhi karena adanya kebijakan *physical distancing*, terlebih lagi untuk kawasan DKI Jakarta sudah berstatus PSBB. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian terkait prasyarat pemberian dana bantuan sosial di tengah situasi ini.

Pemberian bantuan tunai langsung tanpa kondisi tertentu perlu dipertimbangkan untuk digunakan dalam kondisi yang memungkinkan. Ini akan memberikan keleluasaan bagi penerima bantuan untuk menggunakan sesuai kebutuhan mereka dibandingkan dengan dengan bantuan barang ataupun subsidi. Penyaluran bantuan juga dapat dilakukan dengan lebih efisien memanfaatkan teknologi digital yang telah tersebar luas terutama di daerah perkotaan.

- **Program Kartu Prakerja mungkin tidak dapat diharapkan untuk menjadi elemen bantuan yang efektif.** Meskipun pemerintah telah berupaya melonggarkan syarat dengan mengharuskan pelatihan secara *online*, calon peserta belum tentu terbiasa dengan platform tersebut. Jenis pelatihan *hard-skill* seperti menjahit, menenun, memasak, dan lain-lain menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan karena keperluan membeli alat dan bahan. Oleh karena itu, peralihan fungsi sementara Kartu Prakerja mungkin diperlukan. Selama masa pandemi, Prakerja sebaiknya berfokus pada fungsi penyaluran bantuan sosial dan mengurangi aspek *training*. Tentu, jika ini terjadi, maka komunikasi publik yang jelas dan reguler perlu digalakkan. Ini penting untuk mencegah salah kaprah di masyarakat mengenai “pengangguran digaji” dan mengantisipasi *moral hazard* setelah pandemi selesai. Pasalnya, skema yang sekarang berpotensi menimbulkan dilema motivasi peserta: apakah untuk meningkatkan keterampilan atau memperoleh uang. Ketidakseriusan peserta mendorong pelaksanaan pelatihan, yang berbiaya cukup tinggi, menjadi percuma dan cenderung sebagai pemberoran.
- **Nominal insentif hanya meliputi sebagian kecil total pengeluaran.** Per Maret 2019, penduduk yang berada pada garis kemiskinan per kapita memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp425.250,- per bulan. Sementara, pengeluaran makanan per kapita mereka sebesar Rp 313.323,- atau setara dengan 73 persen dari total pengeluaran.⁸ Belum lagi, besar kemungkinan pendapatan mereka menurun dalam situasi pandemi, sehingga mereka berada dalam bahaya kelaparan. Pemberian Sembako telah mencakup 47 persen dari total pengeluaran, atau kurang 26 persen dari pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran. Maka, nominal sembako perlu dinaikkan setidaknya 30 persen dari total pengeluaran sebulan. Demikian pun untuk pemegang Kartu Prakerja, nilai bantuan dinilai belum optimal. Insentif tunai yang hanya Rp 600.000 dinilai tidak cukup. Pelatihan *online* memerlukan listrik dan internet yang artinya pengeluaran untuk komponen tersebut membengkak. Jika tujuannya adalah meningkatkan daya beli, maka penambahan insentif ataupun restrukturisasi dana pelatihan dan insentif perlu dipertimbangkan.

Ketidakpastian Lamanya Pandemi dan Kesiapan Pemerintah Menyiapkan JPS

- **Lamanya pencairan insentif mengakibatkan bantuan sosial ini tidak berdampak secepat yang diharapkan.** Semakin lama durasi pelaksanaan dan distribusi bantuan sosial, semakin lama pula jangka waktu hingga bantuan sosial ini berdampak pada daya beli masyarakat. Misalnya, untuk Kartu Prakerja, durasi yang dibutuhkan untuk melakukan seleksi pendaftar dan menyelesaikan pelatihan memengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan

⁸ Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019, BPS (2019)

hingga pemegang kartu menerima insentif. Demikian pun dengan seberapa banyak kapasitas satu gelombang pendaftaran dan sesering apa pendaftaran tersebut dibuka. Sebagai contoh, bayangkan bahwa satu gelombang hanya untuk 175.000 peserta *training*. Dengan target 5,6 juta penerima manfaat dalam setahun berarti pendaftaran akan dibuka setiap minggu. Sehingga, dalam sebulan berarti hanya ada 700.000 penerima manfaat pada level nasional. Selain itu, tanpa adanya prioritas wilayah untuk pemegang Kartu Prakerja, fungsi program dalam penanganan dampak pandemi pun berpotensi salah sasaran.

- **Pemerintah perlu menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan selama pandemi.** Pandemi berpotensi mempengaruhi pasokan dan harga pangan dunia. Hingga Maret, harga beras dunia tercatat lebih tinggi 4,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Untuk beberapa jenis beras, harga bahkan telah naik sekitar 9 persen dari awal tahun.⁹ Oleh karena itu pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah impor pangan secara dini dibandingkan harus menunggu keterbatasan pasokan dalam negeri di tengah pasar dunia yang semakin sulit. Pemerintah tidak boleh membiarkan kenaikan harga akibat kelalaian, seperti kejadian mahalnya bawang bombai, yang diakibatkan oleh terlambatnya penerbitan rekomendasi dan izin impor bawang bombai.
- **Pentingnya antisipasi dampak ekonomi dari pandemi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.** World Health Organization (WHO) memprediksi bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menemukan vaksin COVID-19 adalah 18 bulan. Selama vaksin belum ditemukan, masih belum jelas sampai kapan Indonesia akan menerapkan kebijakan pembatasan jarak sosial. Dengan demikian, selama aktivitas ekonomi belum berjalan normal, pemerintah perlu mempersiapkan anggaran bilamana durasi waktu pemberian JPS harus diperpanjang.

Mekanisme Distribusi Masih Rentan Kebocoran

- **Penggratisan dan subsidi tagihan listrik rentan pemborosan konsumsi.** Peralihan aktivitas dari kantor atau tempat bekerja ke rumah tentu berpotensi meningkatkan konsumsi listrik yang ditanggung rumah tangga. Jika tidak dikontrol, skema pembebasan dan pemotongan tagihan ini memungkinkan terjadinya pemakaian listrik berlebihan atau pemborosan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah bisa mengubah skema dengan menetapkan nominal tagihan listrik yang dipotong untuk pengguna pasca-bayar. Adapun bagi pengguna prabayar, pemberian nominal saldo yang tidak hanya mengacu pada konsumsi listrik tiga bulan terakhir. Nominal saldo perlu mempertimbangkan peningkatan konsumsi listrik selama periode kerja dari rumah dalam perhitungan.
- **Program Sembako memiliki mekanisme khusus bagi daerah tak terjangkau fintech, serta distribusi e-Warong di Indonesia belum merata.** Banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau teknologi keuangan maupun internet. Hal ini menyebabkan distribusi Sembako memerlukan mekanisme khusus, karena tidak adanya akses untuk KKS. Contoh kasus yang potensial terjadi adalah korupsi atau penjualan kembali *voucher* bantuan yang seharusnya dibagikan secara gratis. Oleh karena itu, pemerintah harus ketat dalam *monitoring* distribusi di tingkat daerah, serta memastikan mekanisme khusus masih menerapkan *physical distancing*. Selain itu, persebaran e-Warong di Indonesia masih belum merata dan belum dapat memenuhi tambahan KPM. Dilansir dari Warta Ekonomi, setidaknya dibutuhkan 128.983 e-

⁹ FAO Rice Price Update, tersedia di <http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/>

Warong untuk menampung tambahan alokasi e-Warong¹⁰. Sementara saat ini, hanya terdapat 98.311 e-Warong di Indonesia. Angka tambahan sebesar 30.672 ini didapatkan dengan mengasumsikan bahwa satu e-Warong melayani 155 KPM. Selain di daerah episentrum penularan COVID-19, pemerintah tidak boleh luput memperhatikan persebaran e-Warong di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Penutup

Selama masa pandemi, kebijakan pembatasan jarak sosial diterapkan dengan harapan bahwa penyebaran virus corona tidak semakin meluas. Sayangnya, tidak semua orang bisa bekerja atau belajar dari rumah lantaran tak mampu memenuhi “biaya” untuk tinggal di rumah. Seiring berjalanannya waktu, mulai terjadi pemutusan hubungan kerja serta hilangnya pendapatan sebagai dampak dari pandemi. Di sinilah pemerintah berperan melalui ragam program Jaring Pengaman Sosial untuk menyokong kehidupan kelompok yang rentan. Lalu, akankah program JPS berjalan efektif dan efisien? Setidaknya ada empat hal yang memengaruhi. Pertama, seberapa tepat cakupan dan pemetaan target penerima bantuan sosial. Kedua, terkait waktu, seberapa cepat bantuan diterima dan seberapa antisipatif pemerintah jika pandemi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Ketiga, sefleksibel apa persyaratan dan skema program. Terakhir, ketepatan mekanisme distribusi bantuan.

Secara umum, berikut adalah beberapa catatan dan rekomendasi terkait JPS. **Pertama**, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme *self-reporting* bagi yang terdampak dan membutuhkan bantuan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain atau pihak swasta, terutama *start-up* yang memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan. **Kedua**, sisi suplai seperti produksi pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. **Ketiga**, persyaratan untuk memperoleh bansos perlu dilonggarkan sesuai dengan kondisi terkini. Bahkan bila perlu, bantuan sosial diubah menjadi tidak kondisional. **Keempat**, diperlukan komunikasi publik yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya. **Kelima**, sebagaimana pelaksanaan program bantuan sosial berada di bawah Kemensos, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian PUPR, hingga Pemerintah Daerah, sinergi antar K/L diperlukan. Meskipun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan, kunci kesuksesan program ini berada pada komunikasi, kerja sama dan koordinasi *multi-stakeholder*.

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160
Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (62-21) 384 7517 | csis.or.id

COVID-19 Commentaries Editors
Philip J. Vermonde, Yose Rizal Damuri, Beltsazar Krisetya

10 <https://www.wartaeconomia.co.id/read280198/indef-minta-jokowi-tambah-kartu-sembako-karena>